



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

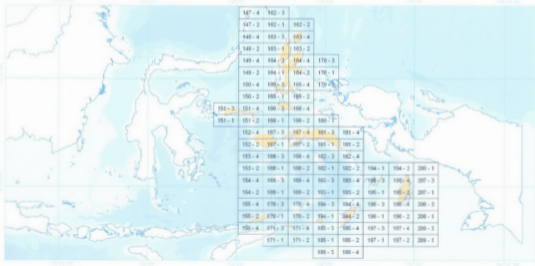
**LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN MALUKU**

**PETA RENCANA POLA RUANG
KEPULAUAN MALUKU**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INDEKS PETA





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA POLA RUANG KEPULAUAN MALUKU KETERANGAN GAMBAR

SKALA 1 : 500.000



Jarak dalam
Datar Horizontal 1:100.000

ADMINISTRASI

- Kota Provinsi
- Kota Kabupaten/Kota
- Gunung
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Landas Kontinental (BLK), telah di sertifikasi
- BLK, perlu kesepakatan
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia
- Batas ZEE Indonesia, belum disertifikasi
- Batas ZEE Indonesia, perlu kesepakatan
- Batas Laut Teritorial (BLT)
- BLT, perlu kesepakatan
- Jaringan Jalan
- Sungai

- Gula Pantai
- Daerah Waduk

KAWASAN LINDUNG

- Perencanaan Pesisir Hijau
- Jalur Migrasi Pesisir
- Jalur Migrasi Laut-Luar
- Cagar Alam
- Saka Mangrove
- Taman Nasional
- Saka Alam Perairan
- Taman Wisata Alam Laut/Taman Wisata Perairan
- Batas Lindang
- Zona Terumbu Karang

- Perencanaan Rias Dangkal

KAWASAN BUDIDAYA

- Kawasan Maripolitan
- Kawasan Perikanan Hutan
- Kawasan Perikanan Perikanan
- Kawasan Perikanan Perikanan
- Kawasan Perikanan Perikanan
- Kawasan Perikanan Perikanan Minal di dan atas Gas Bumi Lepas Pantai, masih ditengahkan kawasan perikanan lainnya dalam rencana tata ruang yang lebih detail
- Kawasan Perikanan Perikanan Minal, masih ditengahkan kawasan perikanan lainnya dalam rencana tata ruang yang lebih detail
- Kawasan Perikanan Perikanan di Kawasan Perikanan Hutan
- Kawasan Perikanan Perikanan di Kawasan Perikanan Hutan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA POLA RUANG KEPULAUAN MALUKU KETERANGAN GAMBAR

SEKTOR UNGGULAN

Sektor Unggulan Pariwisata

Sektor Unggulan Perikanan

KAWASAN ANDALAN DARAT

- 1 Kawasan Andalan Seram
- 2 Kawasan Andalan Kai-Aru-Palau Weh-Palau Tanimbar
- 3 Kawasan Andalan Iru
- 4 Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sulawesi-Sofifi-Wada dan Sekitarnya
- 5 Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan
- 6 Kawasan Andalan Kepulauan Sula

KAWASAN ANDALAN LAUT

- 1 Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya
- 2 Kawasan Andalan Laut Arifian dan Sekitarnya
- 3 Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya

GUGUS PULAU/KEPULAUAN (GP)

- 1 GP Maori
- 2 GP Halmahera Utara
- 3 GP Halmahera Barat
- 4 GP Ternate-Tidore
- 5 GP Halmahera Teras-Halmahera Tengah
- 6 GP Halmahera Selatan
- 7 G. Kepulauan Sula Bagian Timur
- 8 G. Kepulauan Sula Bagian Barat

- 9 GP Iru
- 10 GP Seran Barat
- 11 GP Seran Utara
- 12 GP Seran Selatan
- 13 GP Arben dan Palau-Palau Lease
- 14 GP Seran Timur
- 15 G. Kepulauan Banda
- 16 G. Kepulauan Kai
- 17 G. Kepulauan Aru
- 18 G. Kepulauan Tanimbar

- 19 G. Kepulauan Babar
- 20 G. Kepulauan Torselatan

KEDALAMAN LAUT

- | | |
|--|---------------|
| | 0 - 500 m |
| | 500 - 1000 m |
| | 1000 - 3000 m |
| | 3000 - 5000 m |
| | > 5000 m |

SUMBER PETA:

- Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia skala 1:250.000, Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2000
- Peta Batas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) BIG, Tahun 2011
- Peta Batimetri Skala 1:1.000.000, Dinas Hidro-Oceanografi TNI-AL, Tahun 2006
- Peta Penetapan Kawasan Hutan dan Peruntukan Provinsi Maluku Utara Berdasarkan SK.490/Menhut-0/2012 tanggal 5 September 2012, dan Provinsi Maluku Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 415/KP/TS-0/1999, tanggal 10 September 2012 skala 1:250.000
- Peta Kawasan Perencanaan skala 1:1.000.000, Kementerian Pertanian, Tahun 2009
- Peta Kawasan Perencanaan Pertambangan (KPP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM), Tahun 2013
- ATLAS Sumberdaya Kelautan BIG, Tahun 2006
- Peta Sebaran Kawasan Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tahun 2010

KETERANGAN PETA:

- Kedalaman informasi peta adalah 1:500.000
- Peta ini merupakan gambaran sebaran indikator lokasi pemanfaatan ruang, dan tidak dapat digunakan untuk telah mikro serta pemberian izin pemanfaatan ruang
- Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis-garis batas administratif
- Garis batas internasional mengacu pada Peta Batas NKRI BIG, Tahun 2011
- Hasil kajian Tim Teknis KTR Palau dan hasil analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 147 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 147 - 4

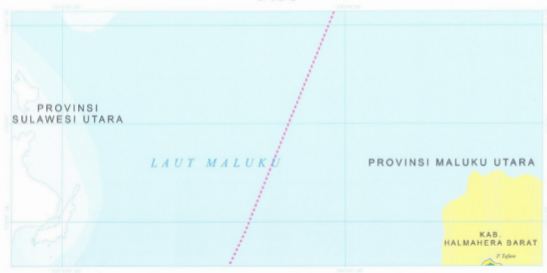
LAUT SULAWESI

PROVINSI SULAWESI UTARA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 148 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 148 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 149 - 2





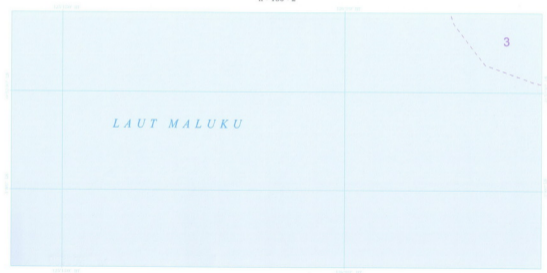
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 149 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 150 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 150 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 151 - 1



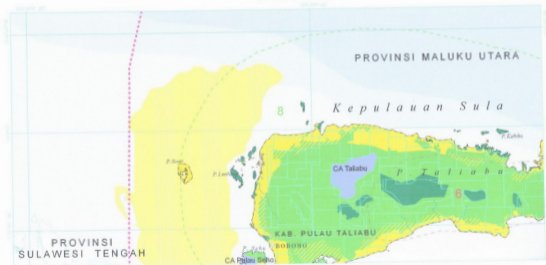


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 151 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 151 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 151 - 4



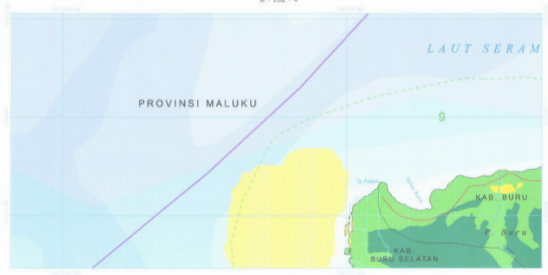


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 152 - 2



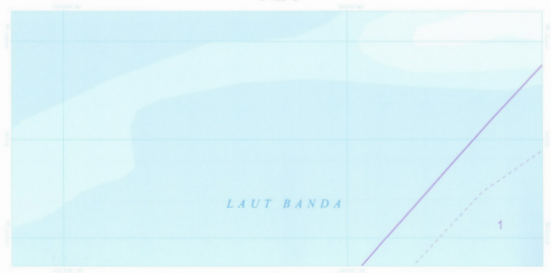


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 152 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 153 - 2



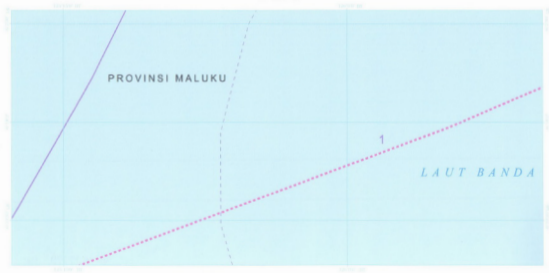


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 153 - 4





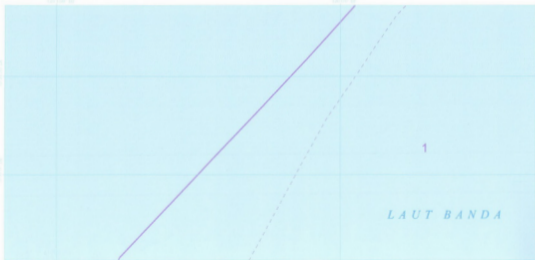
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 154 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 154 - 4



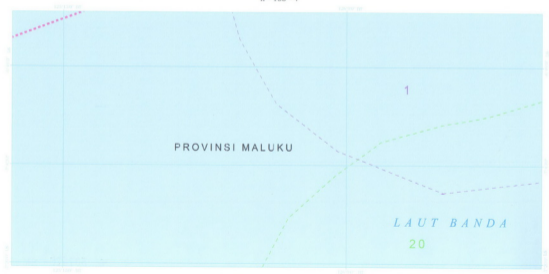


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 155 - 2



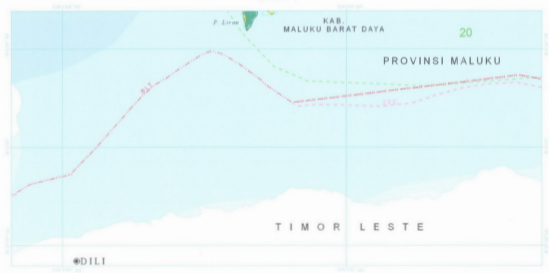


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 155 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 156 - 4





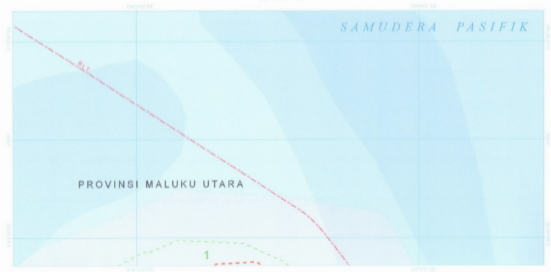
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 162 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 162 - 2





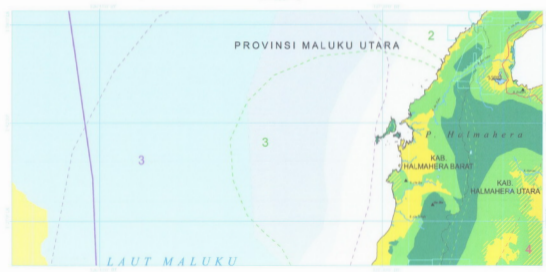
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 162 - 3



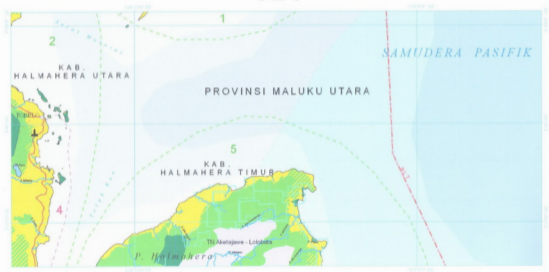


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 163 - 1



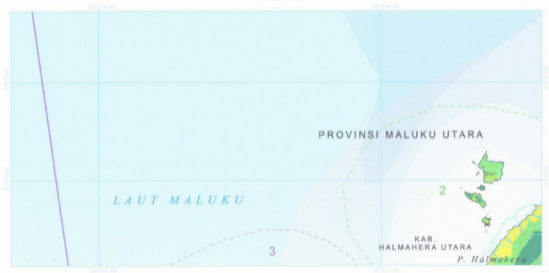


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 163 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 163 - 3





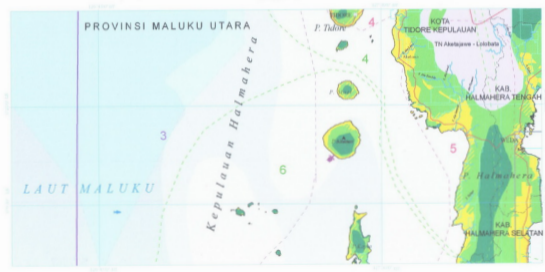
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 163 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 164 - 1



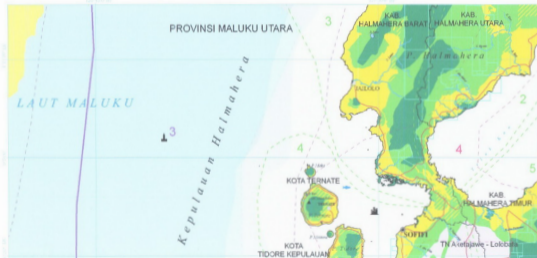


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 164 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 164 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 164 - 4



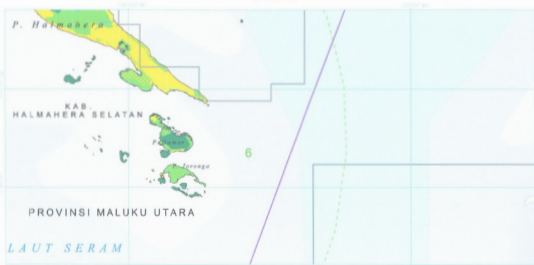


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 165 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
B - 165 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 165 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 165 - 4



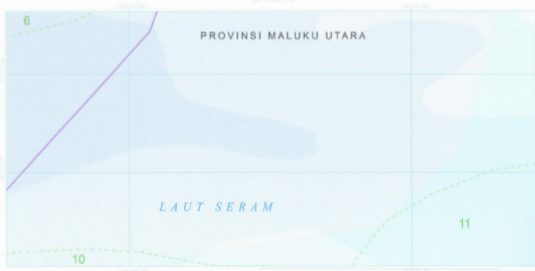


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 166 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 166 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 166 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 166 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 167 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 167 - 2



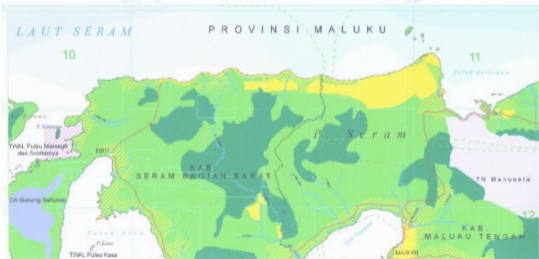


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 167 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
B - 167 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 168 - 1

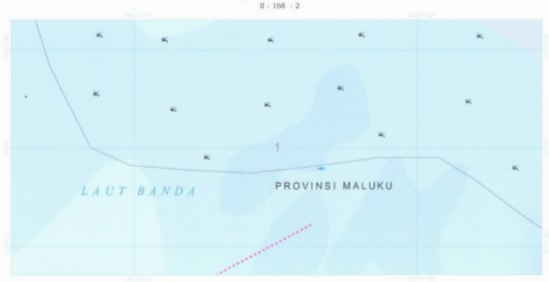
PROVINSI MALUKU

1

LAUT BANDA

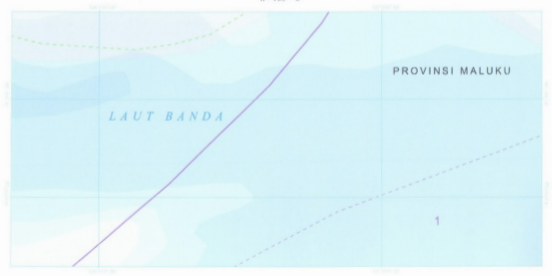


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 168 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 168 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 168 - 4



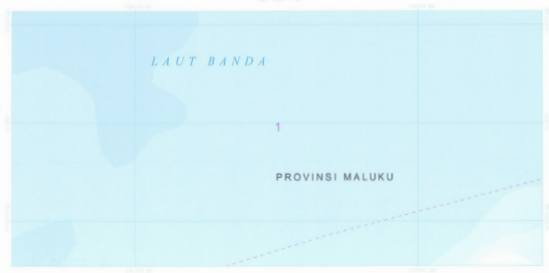


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 169 - 1



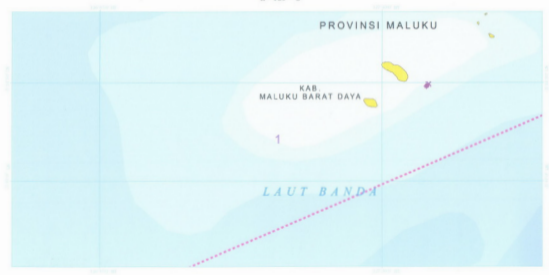


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 169 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 169 - 3



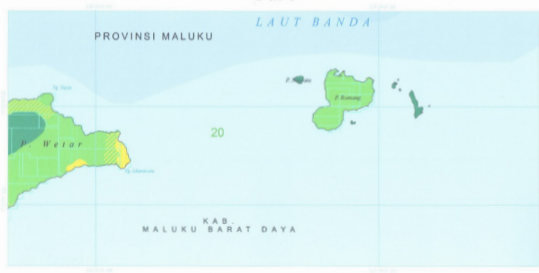


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 169 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 170 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 170 - 2





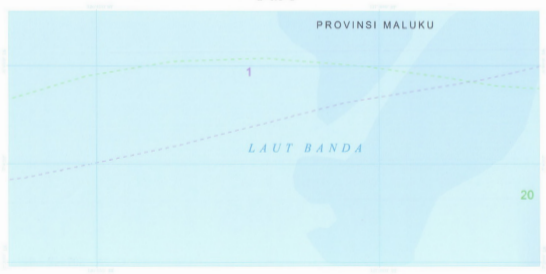
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
B - 170 - 3

PROVINSI MALUKU

LAUT BANDA

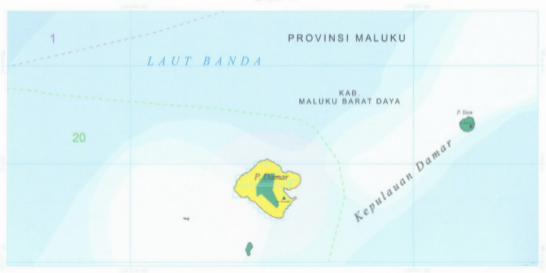
1

20





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 170 - 4



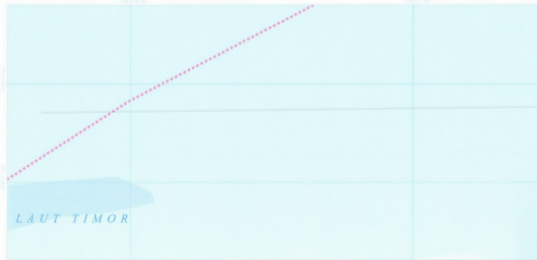


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 171 - 1



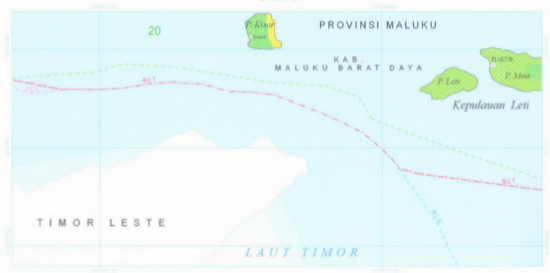


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 171 - 2



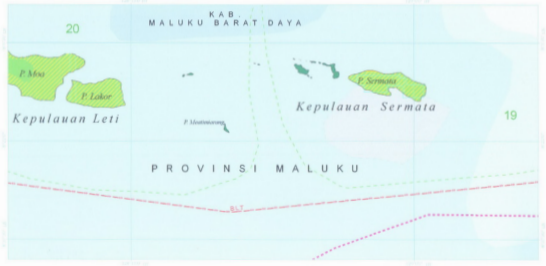


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 171 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 171 - 4





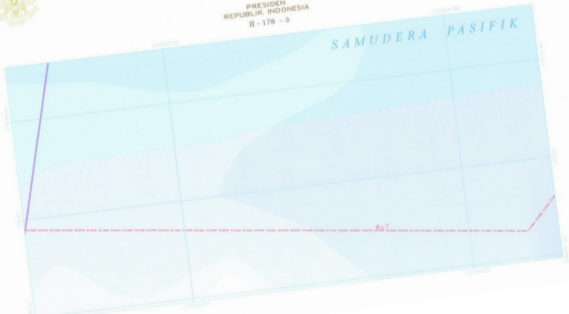
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 178 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 178 - 3

SAMUDERA PASIFIK



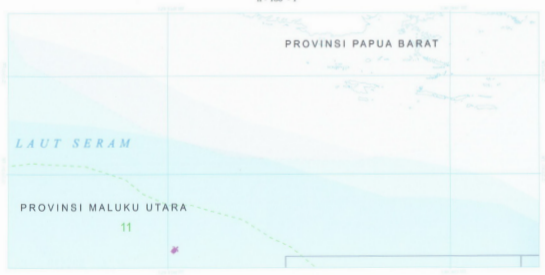


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 179 - 3



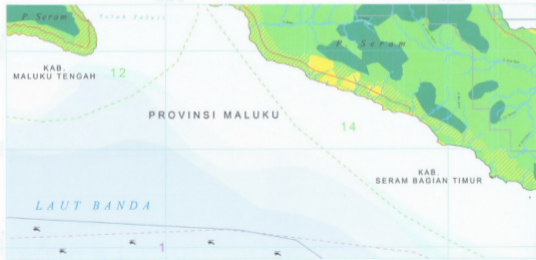


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 180 - 1



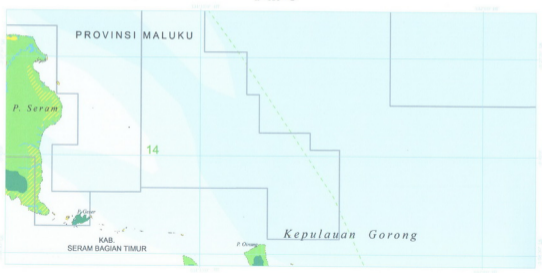


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 181 - 1





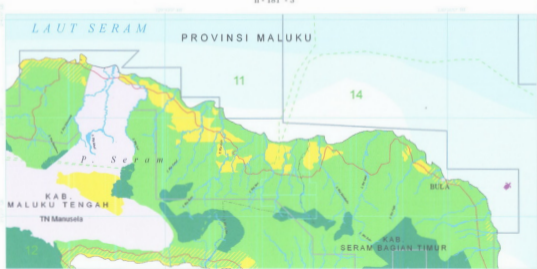
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 181 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 181 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 181 - 4





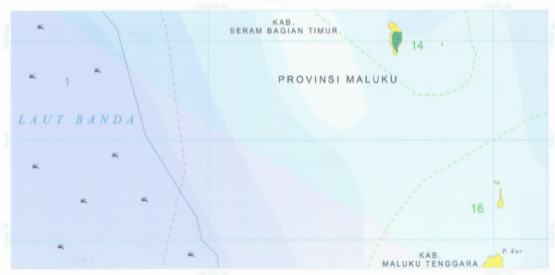
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 182 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 182 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 182 - 3



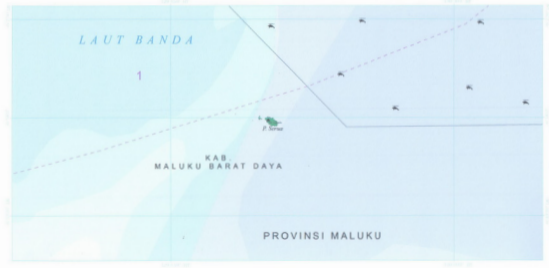


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 182 - 4



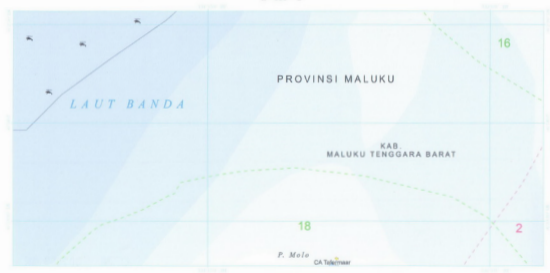


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 183 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 183 - 2



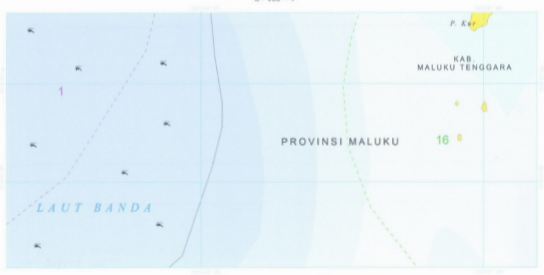


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 183 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 183 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 184 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 184 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 184 - 3



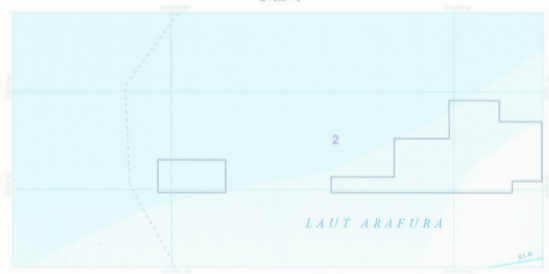


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 184 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 185 - 1



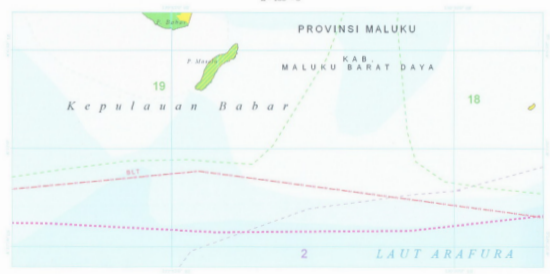


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 185 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
B - 185 - 3



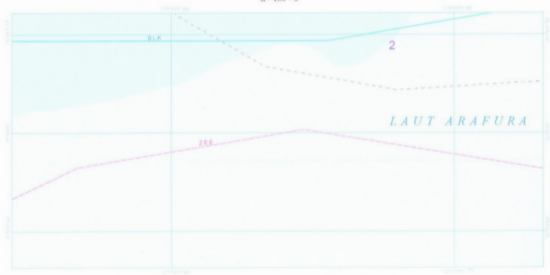


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 185 - 4





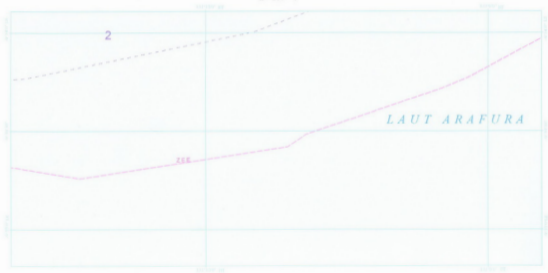
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 186 - 3





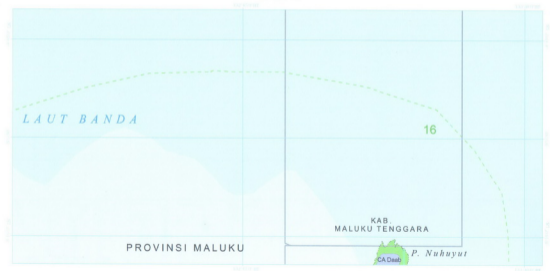
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 186 - 4



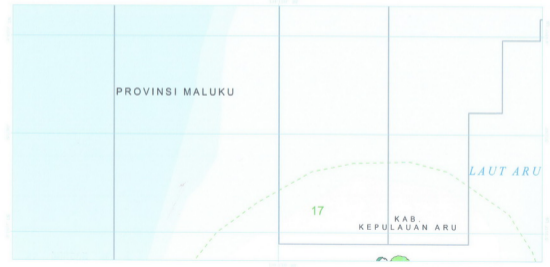


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 194 - 1





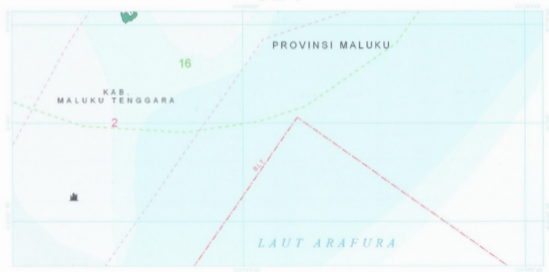
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 194 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 195 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 195 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 195 - 3



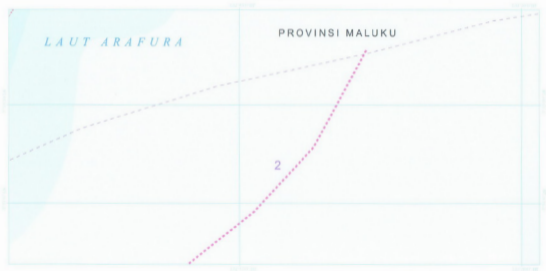


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 195 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 196 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 196 - 2

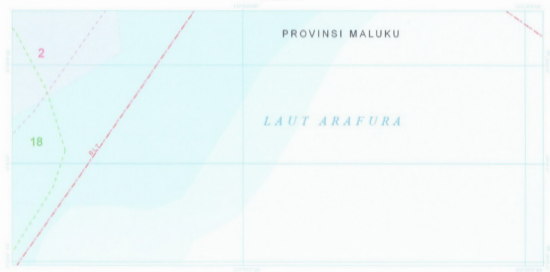
2

PROVINSI MALUKU

LAUT ARAFURA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 196 - 3



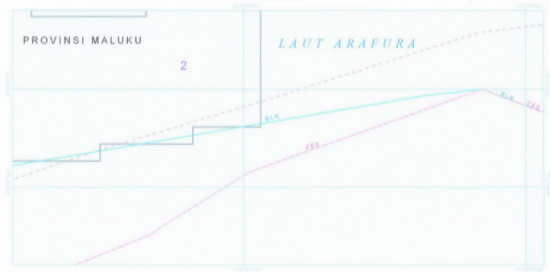


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 196 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 197 - 1





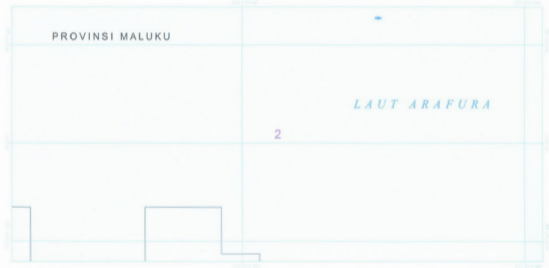
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 197 - 2

1971/1972





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
B - 197 - 3



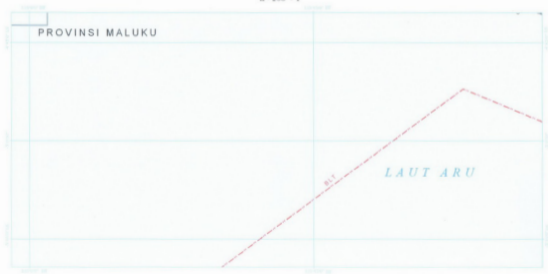


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 197 - 4



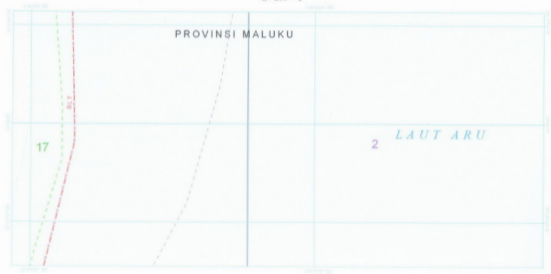


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 206 - 1



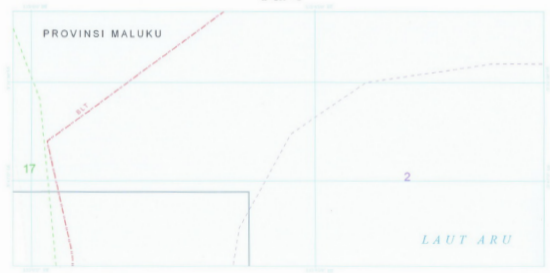


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 207 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
B - 207 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 208 - 1

PROVINSI MALUKU



2

LAUT ARAFURA



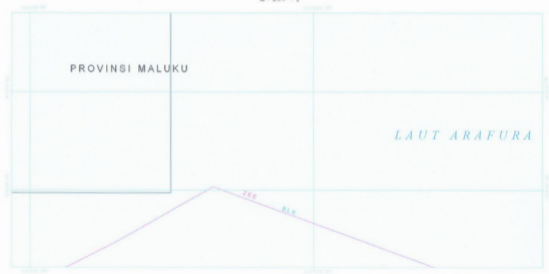
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 208 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 209 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 209 - 3

	PROVINSI MALUKU	
	2	<i>LAUT ARAFURA</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdianti